

# MELIPAT INDONESIA DALAM BERITA TELEVISI:

Kritik atas  
Sentralisasi  
Penyiaran



Remaja  
Literasi



FIKOM  
Unpad



Muhamad Heychael & Kunto Adi Wibowo

2014





# **MELIPAT INDONESIA DALAM BERITA TELEVISI:**

**KRITIK ATAS SENTRALISASI  
PENYIARAN**

**MUHAMAD HEYCHAEL & KUNTO ADI WIBOWO**



**MELIPAT INDONESIA DALAM BERITA TELEVISI:  
KRITIK ATAS SENTRALISASI PENYIARAN**  
Muhamad Heychael & Kunto Adi Wibowo  
©Remotivi, 2014

Laporan penelitian ini merupakan hasil kerja sama Remotivi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran-Jawa Barat, dan didanai oleh Yayasan Tifa.

**Desain penelitian:**

Remotivi (Muhamad Heychael & Roy Thaniago)  
FIKOM UNPAD (Kunto Adi Wibowo & Eni Maryani)

**Penyunting:**

Roy Thaniago

**Tim peneliti:**

Mahasiswa mata kuliah “Riset Media” FIKOM UNPAD 2012 (Deliyanti Cyntya Venny, Kristi Sitohang, Kiani Azalea, Chairunissa, Jihad Akbar Dhaq, Angga, Diwani Zena, Fuad Arrasyid, Reza Prayudha Aji, Tika Karamita, Dahana Savitri, Aldi, Setianto Rahardhi, Fani Oktafianti, Anggih Perian Guswan, Regina Putri, Septian Pujianto, Yunia trichahya)

**Infografis:**

Ellena Ekarahendy

**Sampul dan tata letak:**

Yovantra Arief

Kecuali dinyatakan berbeda, seluruh isi laporan ini dilindungi dengan lisensi Creative Commons Attribution 3.0.



Hak cipta dilindungi secara terbatas

*Remotivi adalah sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Cakupan kerjanya turut meliputi aktivitas pendidikan melek media, penelitian, dan advokasi, yang bertujuan (1) mengembangkan tingkat kemelekmediaan masyarakat, (2) menumbuhkan, mengelola, dan merawat sikap kritis masyarakat terhadap televisi, dan (3) mendorong profesionalisme pekerja televisi untuk menghasilkan tayangan yang bermutu, sehat, dan mendidik.*

remotivi.or.id | kotaksurat@remotivi.or.id | t: @remotivi | f: Lembaga Remotivi



# MELIPAT INDONESIA DALAM BERITA TELEVISI:

## Kritik Atas Sentralisasi Penyiaran

### I. Pendahuluan: Berita, Ruang Publik, dan Demokrasi

Alexis de Tocqueville, seorang sosiolog Prancis, pernah menulis: "Informasi adalah oksigen demokrasi." Ungkapan tersebut menyetengahkan arti penting akses atas informasi sebagai ruh dari demokrasi. Hak kebebasan memperoleh informasi adalah satu hal yang membedakan demokrasi dengan otoritarian. Jika pada otoritarianisme informasi disembunyikan oleh sensor negara, maka pada sistem demokrasi informasi adalah hak semua orang, di mana transparansi praktik bernegara menjadi cirinya.

Tepat, di sinilah arti penting distribusi informasi oleh media massa bagi demokrasi: *"Media diharapkan menyediakan saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang membantu menjelaskan tujuan, merumuskan kebijakan, dan mengkoordinasi aktivitas"* (Curran dalam Haryatmoko, 2003: 77). Hanya dengan begitu, partisipasi aktif warga sebagaimana disyaratkan oleh demokrasi akan mungkin terjadi.

Tanpa informasi yang jujur, adil, dan bernilai bagi publik, maka hampir dapat dipastikan tidak ada publik yang berdaya. Dan tanpa publik yang berdaya, kekuasaan negara dan pemerintah akan berjalan tanpa pengawasan publik. Jauh-jauh hari Lord Acton telah mengingatkan, *"Power tends to corrupt,"* bahwa setiap kekuasaan yang tidak dibatasi akan berakhir dengan penyimpangan. Ya, di sinilah arti penting media dengan slogannya sebagai pilar keempat demokrasi. Karena opini publik yang dibangun media adalah abstraksi dari harapan publik atas jalannya pemerintahan.

Slogan pers sebagai "anjing penjaga" tak hanya berarti memantau pemerintahan pada setiap jenjang, melainkan juga meluas pada berbagai institusi yang berdampak pada kehidupan orang banyak. Kerja pers bukan hanya mengabarkan manajemen pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga menjelaskan bagaimana operasi kekuasaan dan dampaknya pada publik. Berita bukanlah fakta tanpa analisis. Media dituntut untuk menguraikan pelbagai hubungan kekuasaan dan juga menjadikan akibat dari kekuasaan itu diketahui dan dipahami. Tujuannya tidak lain adalah demi membuka opsi yang dimiliki publik untuk bertindak. Hanya dengan pengetahuan yang menyeluruh dan benar, publik bisa berdaya atas keputusan yang dipilihnya.

Media haruslah bekerja dengan kesadaran bahwa informasi yang disiarkannya memiliki implikasi bagi kehidupan orang banyak. *“Informasi yang benar mencerahkan kehidupan. Ia membantu menjernihkan pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat”* (Haryatmoko, 2007: 19). Untuk menjadi alat mengambil keputusan bagi publik luas, nilai sebuah informasi harus memiliki konteks bagi mereka yang menerimanya. Karena itu, fungsi dari berita bukan hanya dalam hal menginformasikan, akan tetapi juga merepresentasikan. Nilai informasi haruslah sejajar dengan skala kepentingan publik luas dan keterwakilannya dalam informasi tersebut. Pada titik inilah ide Habermasian mengenai ruang publik menemukan tempatnya.

Menurut Habermas, media sebagai sarana komunikasi perlu menjadi ruang yang setara bagi semua orang untuk mengakses informasi dan menyatakan pendapatnya (Jones, 2009). Pandangan ini esensial bagi tumbuh kembangnya demokrasi. Itulah mengapa konsep “keberagaman kepemilikan” dan “keberagaman isi” penting dijaga di alam demokrasi. Syarat ini bertujuan tidak lain demi menjaga keragaman perspektif agar tiap orang atau kelompok mendapat kesempatan yang sama dalam membangun opini publik.

Dengan berpegangan pada gagasan media sebagai ruang publik, ragam isi informasi mestilah didasarkan pada kebutuhan untuk melayani pelbagai kepentingan publik yang luas dan beragam. Karena itu, mestinya tidak ada rumusan universal mengenai nilai berita.

Apa yang dianggap penting oleh penduduk Jakarta sudah barang tentu berbeda dengan penduduk di daerah lain. Di Jakarta yang metropolitan, misalnya, berita mengenai kenaikan harga rempah mungkin tidak memiliki nilai informasi yang sama berharganya bagi kebanyakan warga di Kepulauan Banda, Maluku. Dengan kata lain, berita sebagai penyemai demokrasi hanya dimungkinkan oleh adanya keragaman isi dan perspektifnya. Sayangnya, justru yang terjadi sebaliknya: siaran “televisi nasional” kita gagal memberi ruang pada kepentingan masyarakat lokal.

Apa pasalnya? Sistem penyiaran kita bersifat sentralistis. Sepuluh stasiun televisi swasta besar yang memiliki hak siar nasional berada di Jakarta dan bersiaran dari Jakarta. Sentralisasi menghasilkan apa yang dikatakan Ade Armando dalam *Televisi Jakarta di Atas Indonesia* sebagai ketidakadilan ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah belanja iklan televisi beredar di Jakarta. Rumah produksi dan industri iklan sebagian besar tumbuh di Jakarta. Hasilnya, lapangan pekerjaan di industri televisi hanya tumbuh dengan sehat di Jakarta. Lapangan pekerjaan di daerah hanya tersedia di stasiun TV lokal yang merana secara bisnis atau pekerjaan sebagai kontributor stasiun TV Jakarta dengan kesejahteraan yang rendah.

Secara politik, apa yang terjadi di stasiun TV Jakarta bersiaran nasional<sup>1</sup> kurang lebih sama. Banyak daerah di berbagai belahan Indonesia tidak mendapatkan peliputan media yang memadai saat terjadi Pemilu, misalnya. Di sebagian besar tempat, televisi tidak hadir bagi publik yang membutuhkan informasi memadai dalam kontestasi demokrasi. Berita-berita dari daerah luar Jakarta mengenai politik, ekonomi, dan budaya lokal yang disetorkan kontributor harus bersaing dengan berbagai berita “nasional” yang asalnya dari Jakarta. Pada saat yang bersamaan, budaya metropolitan merembes ke berbagai belahan bumi Indonesia seolah tanpa filter. Gaya hidup sinetron dan selebritas yang semuanya berlatarbelakang metropolitan Jakarta, mendesak budaya lokal ke sudut terjauh dari ruang publik kita. Alhasil, sentralisasi membunuh fungsi media sebagai ruang publik. Kita jelas butuh regulasi yang memungkinkan keragaman isi media, demi menumbuhkan ruang publik yang adil.

Semangat desentralisasi penyiaran sesungguhnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU yang lahir pasca-Reformasi ini, menyakini informasi adalah hak publik, karenanya frekuensi gelombang radio sebagai medium penyiaran diatur agar dapat memenuhi tujuan tersebut. UU ini pada pasal 20 mengatur soal Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), yang menyatakan “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.” Dengan pendekatan ini, tak ada stasiun televisi yang boleh bersiaran nasional ke seluruh Indonesia kecuali berjejaring dengan stasiun televisi lokal. Apa yang dimaksud dengan berjejaring adalah pada saat memasuki (bersiaran) daerah lain, televisi induk jaringan hanya boleh sebatas pemasok konten bagi televisi-televisi lokal yang berjejaring dengannya. Ini artinya jika SSJ berjalan, kita tidak akan melihat RCTI, SCTV, TV One, dan televisi nasional lainnya secara langsung dari daerah, kecuali program-program mereka yang ditayangkan di televisi lokal setempat. Harapannya, dengan SSJ bisnis televisi lokal dapat tumbuh, dan seiring dengan itu tumbuh pula konten dan perspektif lokal.

Sayangnya konsep SSJ dalam UU Penyiaran belum juga diimplementasikan. Memang, semenjak 2002, ketika akan disahkan, UU ini mendapatkan penolakan yang alot dari kubu industri penyiaran. Setidaknya ada empat isu besar yang jadi penolakan dan perdebatan terkait pemberlakuan UU ini: (1) Upaya UU penyiaran membatasi konten penyiaran demi perlindungan bagi publik, justru dipahami industri sebagai kekangan atas kebebasan berekspresi; (2) Otoritas Komisi Penyiaran Indo-

---

<sup>1</sup> Karena posisi penelitian ini sebagai oposan dari ide “televisi nasional”, maka penyematan “nasional” mempunyai nuansa yang problematis. Sehingga karenanya, terminologi “televisi nasional” perlu untuk ditulis sebagai “stasiun televisi swasta Jakarta bersiaran nasional” atau selalu menyematkan tanda petik pada kata “nasional”. Ini dilakukan sebagai sikap menggugat atau mempertanyakan konsep nasional pada sistem penyiaran televisi di Indonesia. Tapi untuk kemudahan teknis, dalam penelitian ini, “stasiun televisi swasta bersiaran nasional” akan ditulis sebagai “televisi nasional”.

nesia sebagai lembaga negara independen yang diamanatkan UU untuk meregulasi penyiaran, dengan serampangan disamakan oleh kelompok Industri sebagai kembalinya rezim kekuasaan ala Kementerian Penerangan pada era Orde Baru; (3) Penolakan atas larangan kepemilikan silang, yang terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa pada saat diundangkannya UU Penyiaran, struktur industri penyiaran sudah terjadi kepemilikan silang (Surya Paloh memiliki Metro TV dan Media Indonesia, kelompok usaha Kompas Gramedia memiliki Kompas dan TV7, dan banyak lainnya), dan karenanya, mereka yang diuntungkan oleh praktik monopoli tersebut enggan mengubah status quo yang ada; dan yang terakhir (4) Industri penyiaran menolak pemberlakuan Sistem Stasiun Jaringan yang hendak membatasi jangkauan siaran televisi nasional (Armando, 2011: 160-162).

Pada yang terakhir inilah menurut Ade Armando, penolakan disuarakan paling keras dan nyaring oleh industri. Tulis Ade: “Di luar itu tentu ada masalah-masalah lain. Namun, yang paling mengganjal kelulusan penggolan UU adalah empat isu besar tersebut, terutama soal sistem siaran berjaringan”. Suara penolakan atas SSJ utamanya bersumber dari keengganan untuk berbagai “kue” keuntungan.











*“Kami menolaknya,” kata Teguh Juwarno, manajer Humas RCTI. Menurutnya, pembatasan jangkauan siaran otomatis akan menggerogoti perolehan iklan mereka. Dengan 51 stasiun relai yang dimilikinya, RCTI meraup perolehan iklan terbesar di Indonesia,” tulis Tempo, ‘Jika harus siaran lokal, pendapatan mereka bakal melorot drastis’” (Editorial Tempo edisi 9 September 2002, dalam Armando, 2011: 163-164).*

Suara penolakan itu tak kunjung surut dan suara itu jugalah antara lain yang menyebabkan mengapa hingga kini SSJ masih sebatas butir pasal dalam Undang-Undang yang belum dapat kita temui kenyataannya.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa sistem televisi berjaringan merupakan model yang paling tepat untuk Indonesia yang luas dan beragam. Dalam rangka mendukung sistem stasiun jaringan, penelitian ini bermaksud memotret akibat dari sistem penyiaran yang sentralistis tersebut.

Penelitian hasil kerja sama Remotivi dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini melokalisir studinya pada berita di sepuluh stasiun televisi nasional. Tujuannya adalah untuk memotret bagaimana kerja televisi nasional dalam mengelola ruang publik nasional. Untuk tujuan itu, kami melakukan analisis isi berita terhadap 20 judul program berita yang diambil secara acak selama Oktober 2012, dengan mengambil sampel program berita sore dan program berita malam di masing-masing stasiun TV.

## TAYANGAN BERITA YANG DITELITI

NO.	PROGRAM	STASIUN TV	JUMLAH ITEM BERITA	
1.	Liputan 6 Petang		157	6%
2.	Liputan 6 Malam			
3.	Redaksi Sore		271	10.3%
4.	Redaksi Malam			
5.	Seputar Indonesia Petang		216	8.2%
6.	Seputar Indonesia Malam			
7.	Metro Hari ini		522	19.8%
8.	Metro Malam			
9.	Reportase Sore		158	6%
10.	Reportase Malam			
11.	Topik Petang		243	9.2%
12.	Topik Malam			
13.	Fokus Indosiar		131	5%
14.	Fokus Malam Indosiar			
15.	Lintas Petang MNC Tv		190	7.2%
16.	Lintas Malam MNC Tv			
17.	Kabar Petang		612	23.2%
18.	Kabar Malam			
19.	Buletin Indonesia Siang		138	5.2%
20.	Buletin Indonesia Malam			

Tabel 1.1: Tayangan berita yang diteliti

Dengan pendekatan *convenience sampling*, kami menjadikan 2.638 item berita sebagai sampel, yang durasinya tidak kurang dari 83,5 jam atau 300.663 detik<sup>2</sup>. Tiga hal yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah: (1) Daerah Asal Berita (DAB), yang digunakan untuk melihat provinsi mana saja di Indonesia yang menjadi daerah datangnya sebuah berita; (2) Dimensi Berita, untuk melihat seberapa banyak perbandingan antara berita berdimensi nasional dan lokal, dan datang dari provinsi mana saja berita-berita tersebut; (3) Topik Berita, untuk melihat topik-topik berita apa saja yang mewakili berita yang datang dari berita berdimensi nasional, berdimensi lokal, dan dari masing-masing provinsi.

<sup>2</sup> Jumlah data tersebut di-coding oleh 17 orang coder yang telah dilatih selama 15 jam untuk mencapai reabilitas antar-coder dengan metode Holsti minimal di angka 7,5 (di semua item coding).

## II. Daerah Asal Berita: Separuh dari Indonesia Adalah Jabodetabek.

Ada banyak cara untuk memeriksa bagaimana Indonesia didefinisikan dalam berita televisi. Penelitian ini memulai dari hal yang sederhana, yakni mengukur keberagaman informasi berita dari variabel Daerah Asal Berita (DAB)<sup>3</sup>. Variabel DAB dalam penelitian ini dipilih untuk menjawab seberapa jauh publik di tiap provinsi mendapat ruang pemberitaan dalam stasiun televisi yang mendaku nasional.

Kami menghitung DAB dalam satuan “frekuensi” dan “durasi”<sup>4</sup>. Hasilnya kemudian dikelompokkan ke dalam kategori 33<sup>5</sup> provinsi yang ada di Indonesia. Dari keseluruhan provinsi tersebut, tiga provinsi (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) dimodifikasi pengertiannya. Yakni, wilayah DKI Jakarta termasuk meliputi kota di Jawa Barat (Bogor, Bekasi, Depok) dan Banten (Tangerang), sehingga dipakai istilah “Jabodetabek”. Dengan begitu, dalam penelitian ini Jawa Barat tidak termasuk Bogor, Depok, dan Bekasi, dan Banten tidak termasuk Tangerang. Sementara itu 31 provinsi lainnya sesuai dengan garis batas administrasinya.

Alasannya, Jakarta sebagai ruang sosial dan kultural kini telah melebar hingga Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor, atau yang sering disebut dengan Jabodetabek. Hal ini, misalnya, bisa kita lihat dari batas administrasi Polda Metro Jaya yang meliputi kawasan Jabodetabek. Zona transportasi seperti KRL pun dibangun di atas pembayangan geo-ekonomi Jabodetabek. Sehingga tidaklah adil menempatkan Bogor, Depok, dan Bekasi sebagai bagian dari Jawa Barat dan mengabaikan perbedaan ruang sosial-kultural antara kota-kota tersebut dengan kota lainnya di Jawa Barat. Begitu juga halnya dengan Tangerang yang berada dalam provinsi Banten<sup>6</sup>.

Untuk menunjukkan efek sentralisasi, kami mengelompokkan hasil perolehan DAB

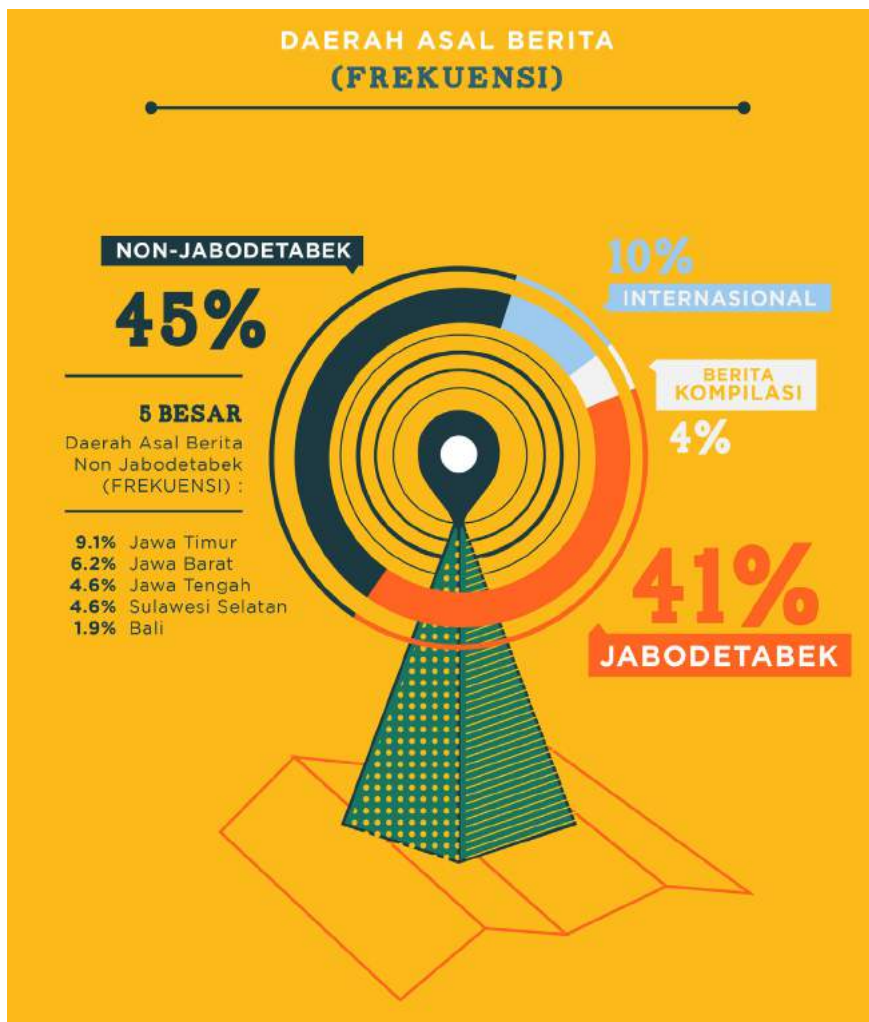
3 “Daerah Asal Berita” atau DAB merujuk pada provinsi yang menjadi tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa yang dilaporkan dalam sebuah berita. DAB dihitung berdasarkan nama provinsi yang tertera di bawah judul utama berita yang tampil di layar.

4 Penghitungan “frekuensi” berdasarkan pada jumlah per kemunculan setiap item berita. Sedangkan “durasi” dihitung berdasar lamanya waktu penayangan setiap item berita. Dengan metode penghitungan macam ini, maka bisa jadi sebuah berita memiliki frekuensi yang tinggi (sering ditayangkan), namun dengan durasi yang singkat (tapi tiap penayangannya hanya sebentar).

5 Pada saat penelitian ini dilakukan, jumlah provinsi di Indonesia berjumlah 33. Kalimantan Utara baru diputuskan menjadi provinsi ke 34, pada Sidang Paripurna DPR 23 Oktober 2012 (pada saat penelitian berjalan) dan diresmikan pada Februari 2013, seiring dengan dilantiknya Irianto Lambrie menjadi gubernur pertama Kalimantan Utara. Karenanya, penelitian ini tidak memasukan Kalimantan Utara sebagai bagian dari kategori provinsi yang di-coding.

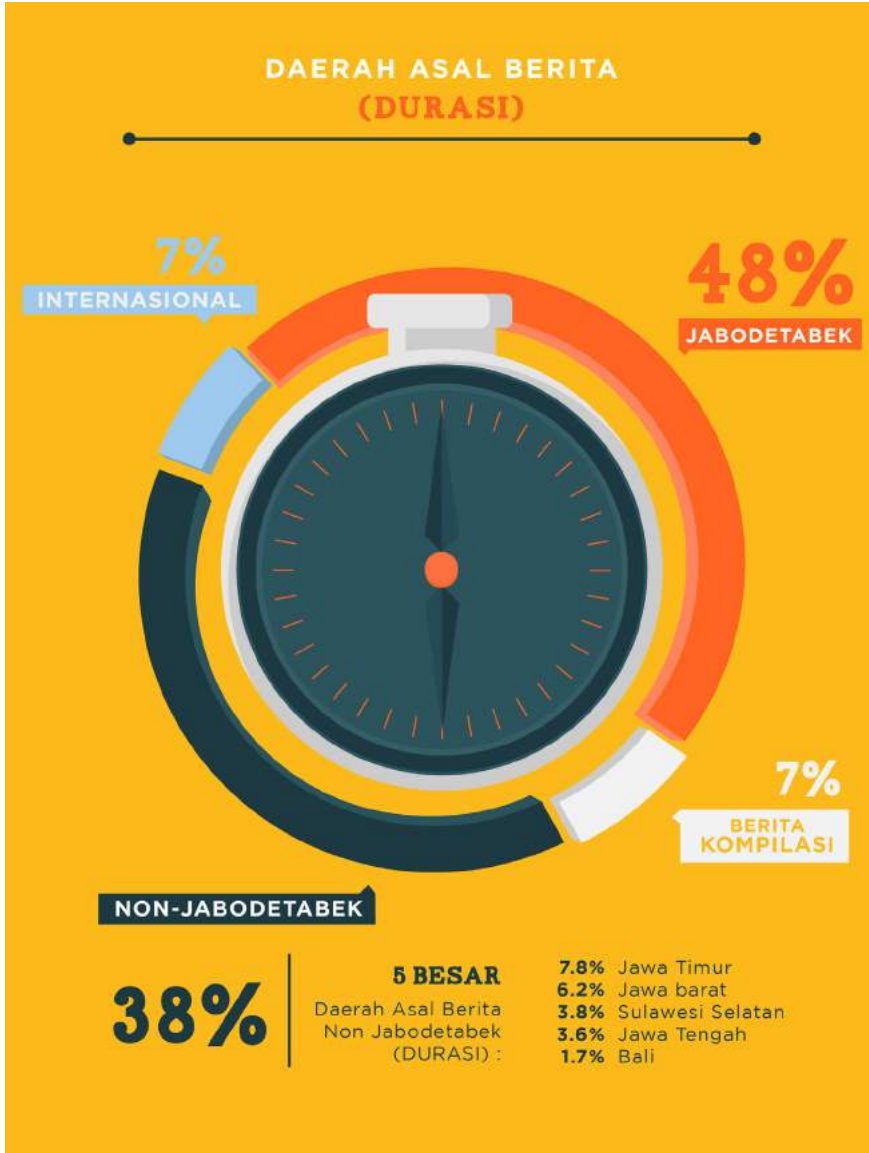
6 Kami menyadari sepenuhnya upaya pendefinisian Jabodetabek sebagai sebuah ruang sosial yang lintas administratif berpotensi bias Jakarta. Sebab formasi ruang sosial dan ekonomi semacam Jabodetabek, mungkin saja ada di wilayah Indonesia lainnya. Namun karena keterbatasan pengetahuan dan perspektif, kami mendefinisikannya tetap berdasar kategori administratif semata.

menjadi dua kelompok besar, yaitu Jabodetabek dan Non-Jabodetabek. Hasilnya, seperti bisa dilihat pada bagan di bawah, Jabodetabek mendominasi “DAB Berdasarkan Frekuensi” dengan angka mencapai 41%. Sementara itu, DAB Non-Jabodetabek memperoleh angka 45%, dan ini mesti berbagi lagi dengan 32 provinsi lainnya.



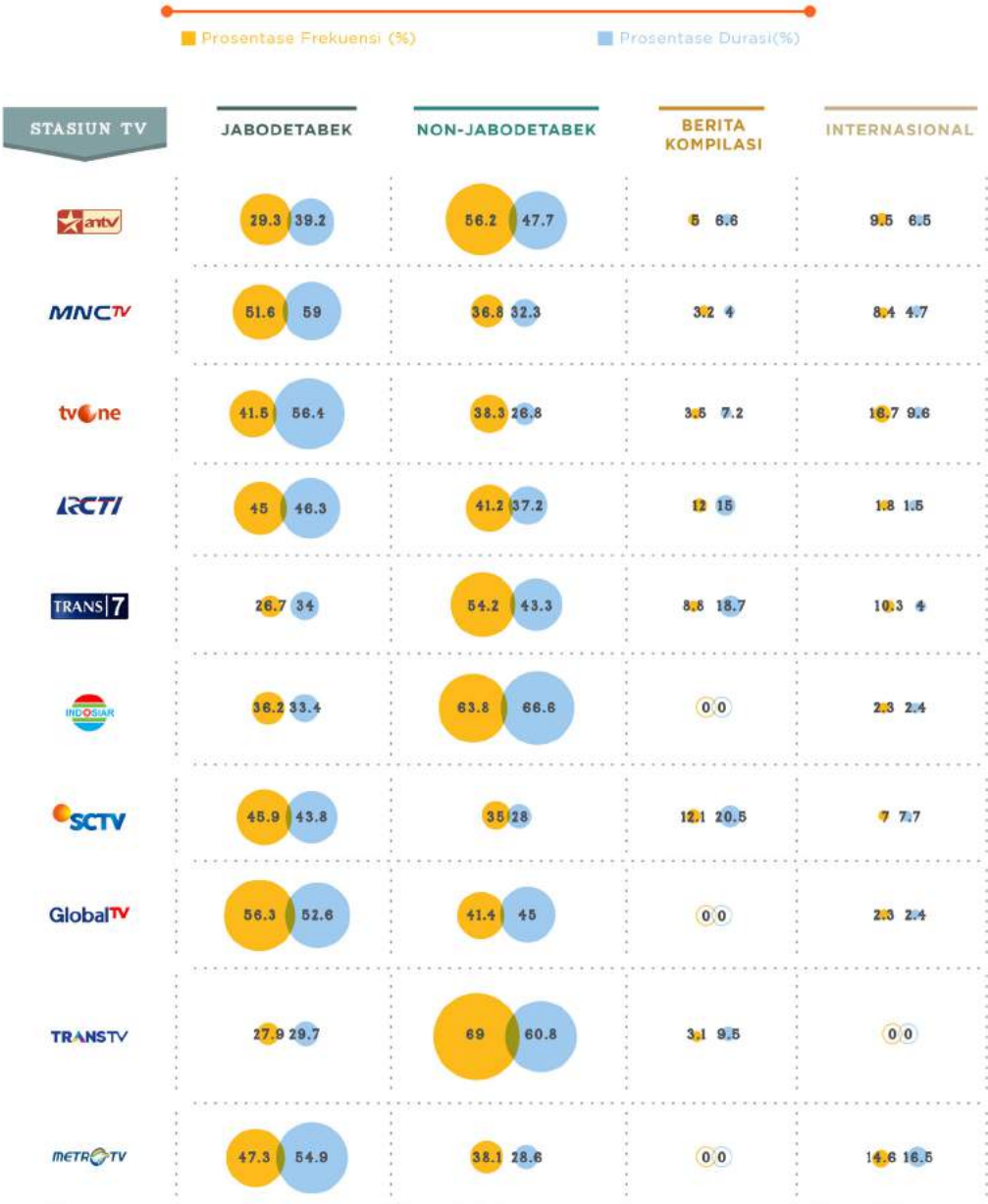
Tabel 2.1: Daerah asal berita (frekuensi)

Melalui data ini kita bisa melihat perbedaan mencolok perhatian televisi nasional terhadap Jabodetabek ketimbang provinsi lainnya. Karenanya tidaklah berlebihan rasanya bila mengatakan televisi nasional menerjemahkan separuh dari Indonesia sebagai Jabodetabek. Terlebih, fakta ini diperkuat oleh temuan “DAB Berdasarkan Durasi” yang juga menunjukkan dominasi Jabodetabek.



Tabel 2.2: Daerah asal berita (durasi)

### DAERAH ASAL BERITA PER STASIUN TV



Tabel 2.3: Daerah asal berita (per stasiun TV)

Bila data-data tadi dipecah ke dalam per stasiun televisi, maka gambaran dari efek sentralisasi menjadi tak terasa. Karena, empat stasiun televisi (ANTV, Trans 7, Trans TV, dan Indosiar) mencatat persentase DAB Non-Jabodetabek yang lebih besar ketimbang DAB Jabodetabek. Namun, yang menjadi pertimbangannya adalah, apakah DAB saja cukup menggambarkan kualitas dan konteks nilai sebuah informasi? Jawabnya tidak, karena DAB hanya mampu menunjukkan keadilan representasi tiap provinsi yang diakomodir oleh stasiun televisi.

Sebab, jangan sampai melupakan bahwa sebuah informasi bisa juga memiliki nilai yang penting bagi sekelompok masyarakat meski informasi itu bukan berasal dari provinsi atau daerahnya. Asal sebuah berita, tidak berarti nilai sebuah berita. Berita asal Jabodetabek, misalnya, bisa berarti bagi masyarakat di seluruh Indonesia jika bicara soal kenaikan bahan bakar minyak, kebijakan pendidikan nasional, ataupun wabah penyakit menular. Sebaliknya, berita asal Non-Jabodetabek juga bisa jadi dibutuhkan bagi banyak orang di daerah lain selama mencakup kepentingan hidup orang banyak. Dengan kata lain, untuk melihat nilai sebuah informasi dan konteksnya bagi publik, dibutuhkan instrumen tambahan selain DAB, yang menjadi ukuran untuk melihat cakupan skala kepentingan publik yang diwakilkan oleh sebuah informasi, yaitu *Dimensi Berita*.

Informasi yang baik sebagai prasyarat kehidupan demokrasi adalah informasi yang juga memiliki nilai aksi. Untuk bisa memiliki nilai aksi, sebuah informasi mesti memiliki konteks dan kedekatan dengan mereka yang menerimanya. Kedekatan atau relevansi inilah tidak bisa semata-mata dilihat dari daerah asal berita. Sebab itu lebih jauh kita perlu melihat dimensi berita atau skala kepentingan publik yang diwakili oleh sebuah informasi.

Berangkat dari perspektif demikian, kami pun membagi berita berdasar dimensinya: lokal, nasional, dan internasional. Dengan pengandaian bahwa berita nasional punya dampak bagi publik luas, tidak hanya berhenti di tempat di mana peristiwa itu terjadi. Sementara berita lokal, berdampak terbatas bagi publik tempat di mana berita terjadi.

### III. Dimensi Berita: Televisi Nasional atau Televisi Lokal Jabodetabek?

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana menentukan dimensi sebuah berita (bersifat lokal, nasional atau internasional), kami mengikuti konsep yang diajukan oleh Gans (2004), dalam *Deciding What News*.

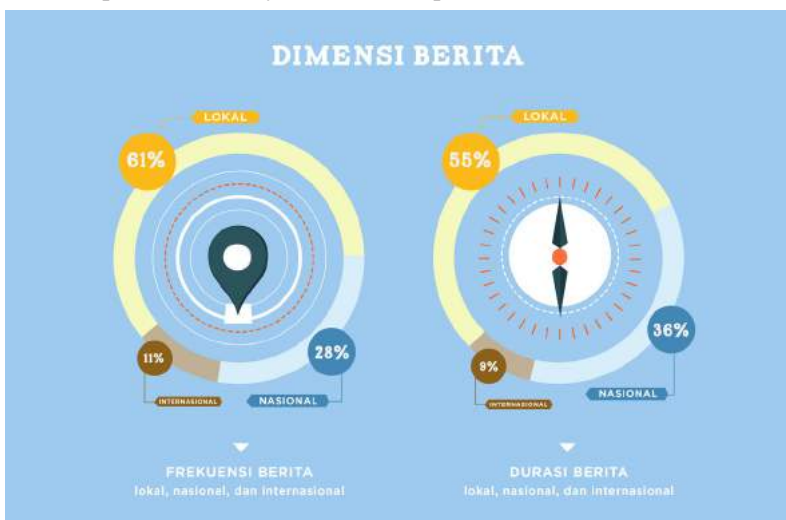
*National news is, by definition, about the nation, and so the most frequent actors in the news are inevitably individuals who play a role in national activities. Which national actors are reported however, is, not inevitable.*

*They could be well-known people, whom I call Knowns; or they could be Unknowns, ordinary people prototypical of the groups or aggregates that make up the nation. The Knowns, furthermore, could be political, economic, social, or cultural figures; they could also be holders of official positions or powers behind thrones who play no official roles (Gans, 2004, hal. 8).*

Gans melihat aktor pemberitaan sebagai penentu ruang lingkup berita. Dimensi berita ditentukan oleh keterlibatan individu maupun institusi yang memainkan peranan di tingkat lokal, nasional, ataupun nasional. Senada dengan Gans, penelitian ini mendefinisikan aktor sebagai orang atau institusi atau organisasi yang ambil bagian atau berperan dalam narasi berita. Aktor bisa tampil secara langsung terlihat dalam gambar dengan berbicara atau sekadar disebutkan namanya dalam *voice over*.

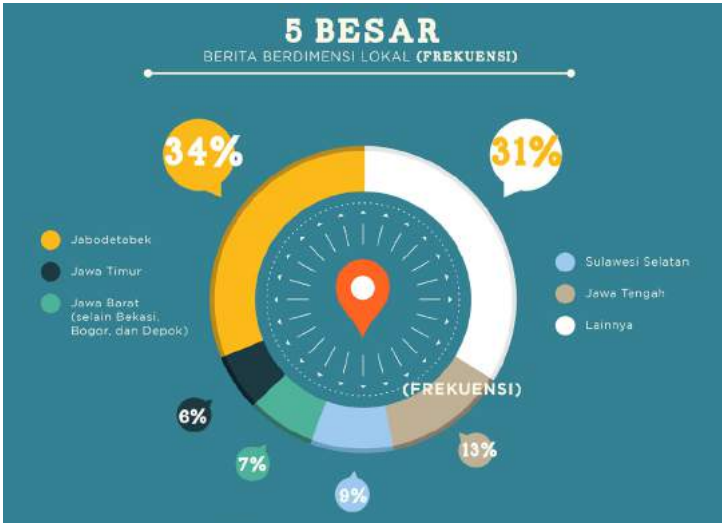
Kami lalu membagi kategori untuk aktor berita menjadi tiga: aktor lokal, aktor nasional, aktor internasional. *Aktor lokal* adalah semua orang atau instansi atau organisasi yang berada di tingkat lokal, misalnya warga lokal, kepala daerah, tokoh masyarakat setempat, ketua atau anggota ormas setempat, pemerintahan daerah, pengadilan daerah, dan kepolisian daerah. Sedangkan *aktor nasional* adalah semua orang atau instansi atau organisasi yang mewakili kepentingan nasional misalnya presiden, ketua umum partai politik, dan semua kepala atau perwakilan instansi pemerintahan, hukum, dan legislatif di tingkat nasional. Terakhir adalah *aktor internasional*, yang melekat pada tokoh dalam konteks internasional, misalnya duta besar, kepala negara asing, ketua organisasi dunia, atau warga negara asing.

Pemisahan kategori berita lokal maupun nasional, rupanya tetap tidak membatalkan hipotesa awal bahwa “separuh Indonesia adalah Jabodetabek”. Hal ini justru kian membuktikan hipotesa tersebut dengan menunjukkan distorsi Jabodetabek yang lingkungannya kian meluas dalam pemberitaan di layar kaca. Karena baik berita nasional maupun lokal, asalnya adalah metropolitan Jakarta.

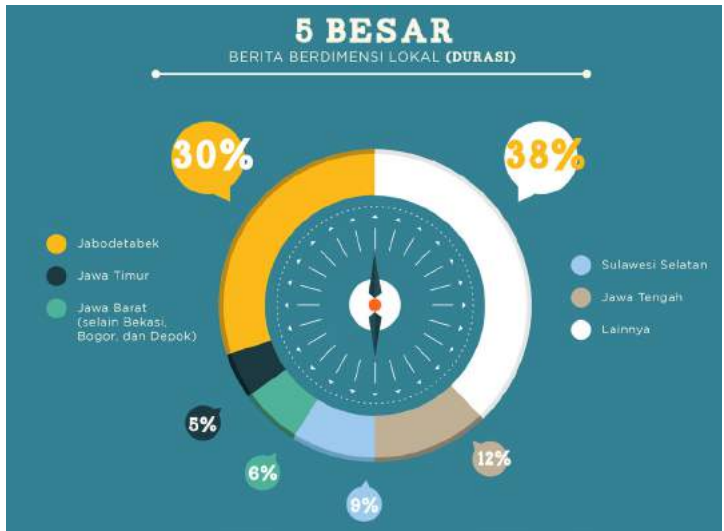


Tabel 3.1: Dimensi berita

Secara frekuensi dan durasi, berita lokal tampak mendominasi layar kaca. Pertanyaan kemudian: provinsi manakah penyumbang terbesar bagi jumlah berita lokal? Jawabnya: Jabodetabek (38% secara durasi, dan 34% secara frekuensi).

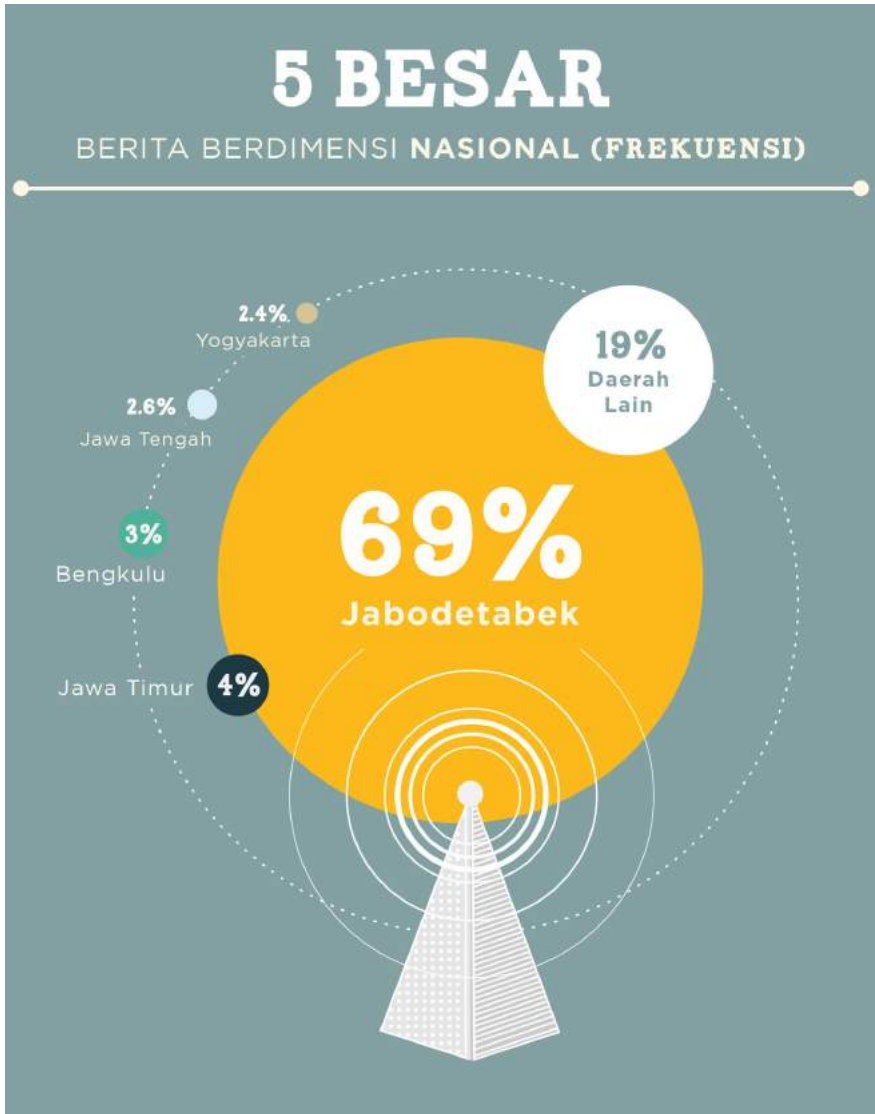


Tabel 3.2: Berita berdimensi lokal (frekuensi)

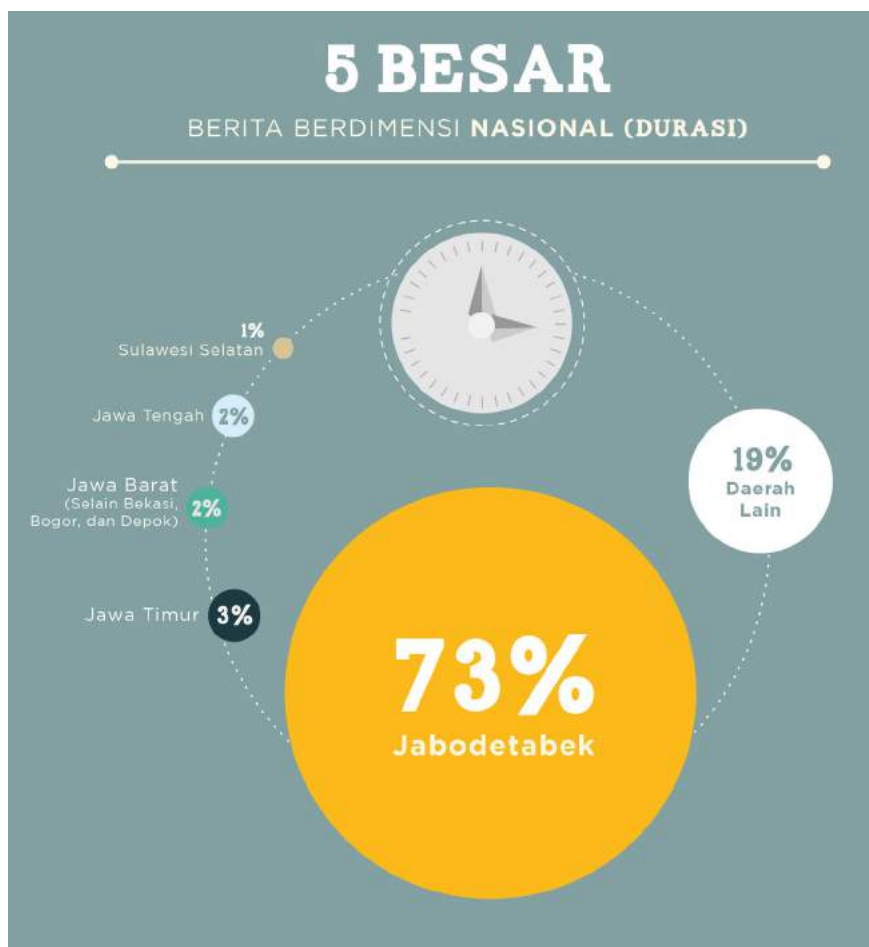


Tabel 3.3: Berita berdimensi lokal (durasi)

Dengan “aktor berita” sebagai garis pembeda antara yang berita lokal dengan nasional, maka bisa dibayangkan apabila berita berdimensi lokal sebagian besar hanya diwakili oleh Jabodetabek. Ini artinya lebih dari 30% berita lokal terjadi dan melibatkan aktor lokal asal Jabodetabek. Dengan kata lain, 1/3 layar kaca kita diisi oleh orang atau tokoh (termasuk perspektif) yang berasal dari Jabodetabek. Persoalan menjadi kian memprihatikan dengan fakta bahwa dominasi Jabodetabek juga terjadi dalam kategori berita berdimensi nasional (69% secara frekuensi, dan 73% secara durasi).



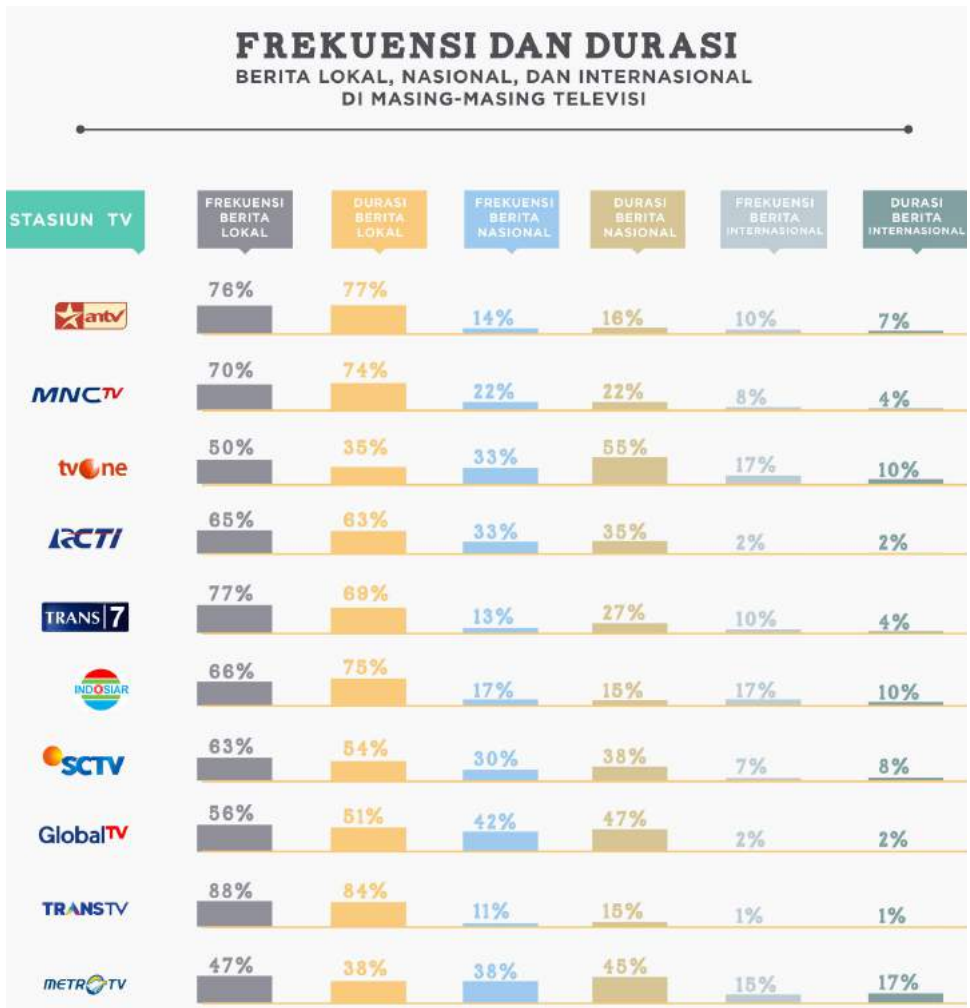
Tabel 3.4: Lima besar daerah asal berita nasional (frekuensi)



3.5: Lima besar daerah asal berita nasional (durasi)

Tentu saja Jakarta adalah ibu kota negara dan banyak insitusi negara yang produktif menghasilkan berita ada di metropilitan Jakarta. Namun, dengan fakta bahwa lebih dari 73% (durasi) berita nasional dan 69% (durasi) berita lokal dihasilkan kota ini, Jakarta telah menjelma lebih dari sekadar ibu kota Indonesia. Jakarta setidaknya oleh pelaku penyiaran telah dianggap sebagai representasi paling absah dari Indonesia.

Pemanggungan Jabodetabek dan peminggiran daerah-daerah lainnya amat terasa dalam konteks berita nasional. Ini sekaligus menunjukkan betapa kecil peluang sebuah berita asal Manado, Papua, Aceh, dan lainnya untuk menjadi berita nasional. Sekalipun daerah luar pusat penyiaran mampu menembus ruang redaksi, setiap daerah harus berkompetisi memperebutkan sisa durasi yang tersedia bagi 33 provinsi lainnya. Data ini sekali lagi mengetengahkan pada kita bahwa dalam konteks penyiaran yang tersentralisasi daerah tidak begitu penting dilihat kecuali sebatas “sekilas” saja.

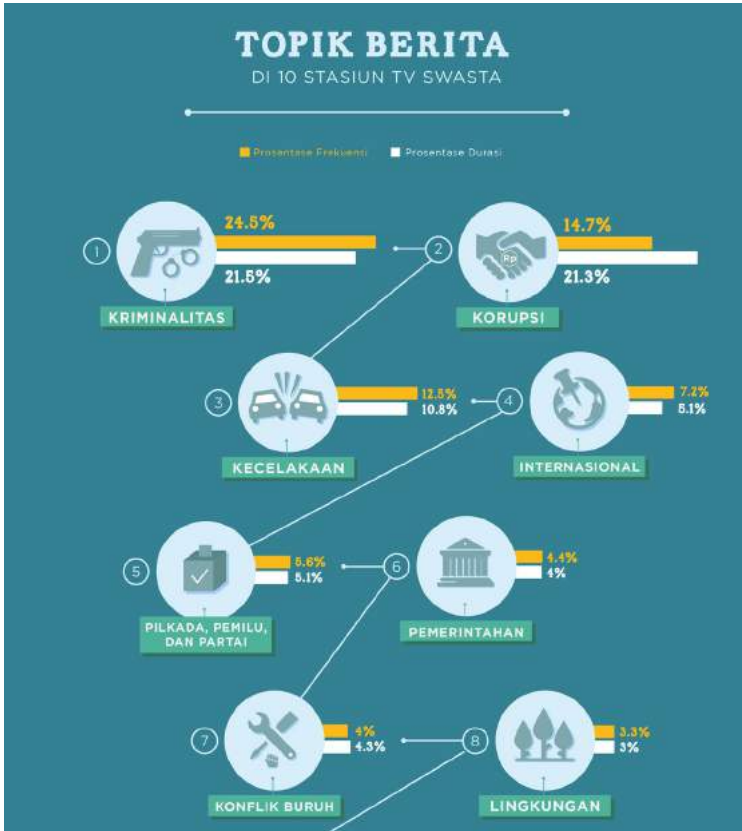


3.6: Frekuensi dan durasi

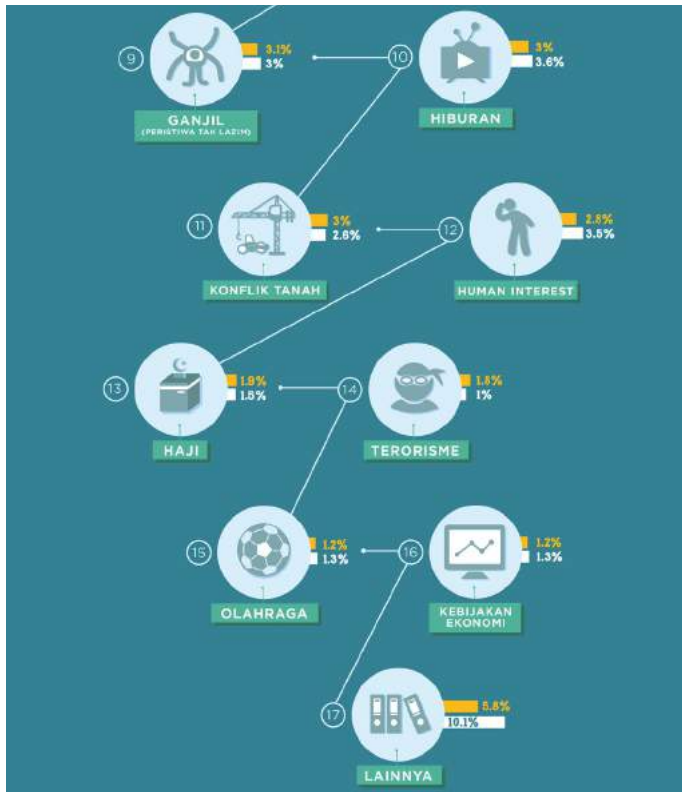
Dengan praktik yang demikian, rasanya tidak berlebihan bila kita mempertanyakan kembali status stasiun televisi swasta Jakarta yang bersiaran nasional: sebagai televisi nasional atau televisi lokal Jabodetabek? Bisa saja dikatakan bahwa televisi kita gagal mengemban tugas “nasional”-nya. Namun mungkin lebih tepat dikatakan tidak ada cukup ruang bagi semua orang dalam sistem penyiaran yang tersentralisasi. Sebab, kebutuhan informasi warga negara Indonesia yang beragam latar belakang etnis, agama, ekonomi, politik, dan geografis tidak akan bisa dipenuhi oleh sistem penyiaran yang tersentralisasi. Dalam penyiaran yang sentralistik, berita daerah di televisi ada hanya sebagai formalitas, bukan prioritas. Sentralisasi penyiaran hanya akan menghasilkan konten berita televisi yang memanggungkan Jakarta dan menjadikan berita daerah di luarnya sebatas parade informasi yang sekilas, sensasional, dan tanpa kedalaman, tak ubahnya Taman Mini Indonesia Indah ala televisi.

## IV. Topik Berita: Kegagalan Jurnalisme TV Mendefinisikan Berita

Secara umum topik berita di televisi nasional jauh dari isu yang sifatnya publik. Berita yang terkait dengan isu publik yang luas seperti politik, ekonomi, dan pendidikan tidak mendapat perhatian yang memadai. Topik seperti “konflik tanah”, misalnya, hanya mendapat 2,6% peliputan (secara durasi), “terorisme” 1%, dan “kebijakan ekonomi” 1,3%. Ironisnya, persentase ketiga topik berita tadi berada di bawah berita yang kami kategorikan sebagai “ganjil” atau “peristiwa tak lazim” (3,1%). Contoh dari berita semacam ini seperti “seorang ibu yang mengeluarkan kawat dari perutnya”, “kambing berkepala dua”, “dukun cilik”, “ibu menghukum anaknya dengan menjemurnya”, dan lainnya. Berita semacam ini jelas tidak memiliki nilai kepentingan publik, kecuali sebatas sensasi yang mengumbar ketegangan atas “misteri” atau “keganjilan”.



4.1.1: Topik berita di 10 stasiun televisi



4.1.2: Topik berita di 10 stasiun televisi

Dengan rendahnya topik berita yang bersifat publik, persentase berita dengan topik kriminalitas (24,5%) dan kecelakaan (12,5%) justru mendapat perolehan angka yang tinggi<sup>7</sup>. Dan meski topik korupsi banyak diliput, tapi masih berpusar pada kasus di Jakarta. Lagi-lagi, sentralisasi memperlihatkan pula dampaknya pada cara jurnalisme TV bekerja. Ini diperlihatkan pada data topik berita yang dibagi berdasarkan daerah asal beritanya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai kriminalitas dan kecelakaan dari daerah Non-Jabodetabek mencapai 32,5% dan 14,4% (durasi), sementara Jabodetabek 15,2% dan 9,6%. Raihan yang lebih besar untuk berita kecelakaan dan kriminal pada berita Non-Jabodetabek mempunyai arti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia (yang tinggal di luar Jabodetabek), hanya mempunyai persoalan kriminal dan kecelakaan di daerahnya tinggal. Sedangkan topik korupsi hanya mendapat persentase 6,6%.

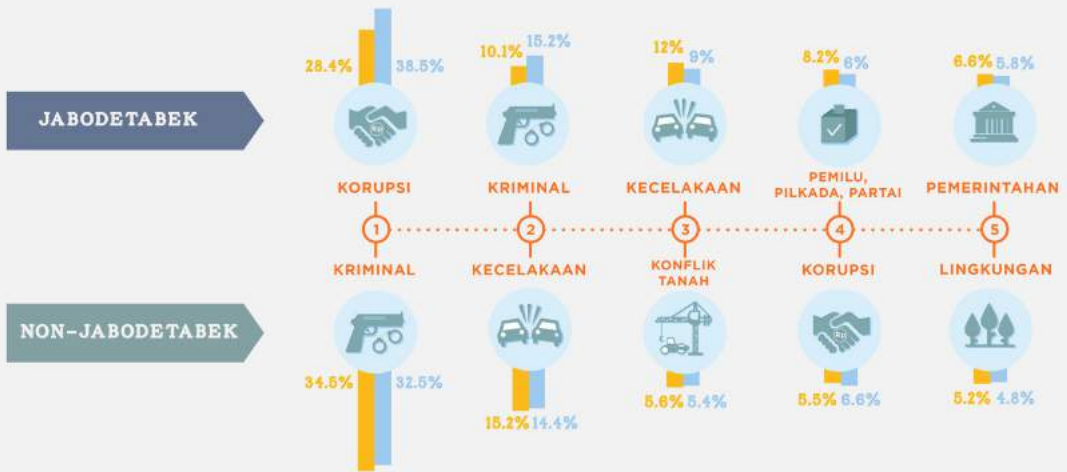
<sup>7</sup> Ini belum ditambah kenyataan bahwa berita kriminalitas dan kecelakaan yang muncul di layar kaca tersebut kerap berhenti pada permukaan, sensasional, atau gagal menyorot persoalan struktural. Kriminalitas atau kecelakaan dilihat sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan dan moral, ketimbang gagal pelayanan publik oleh negara, misalnya

# TOPIK BERITA

## BERDASARKAN DAERAH ASAL BERITA

■ Prosentase Frekuensi

■ Prosentase Durasi



4.2: Topik berita berdasarkan daerah asal berita

Data-data di atas menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama, bahwa jurnalisme TV gagal mendefinisikan berita karena kurangnya mengangkat topik yang punya nilai kepentingan publik. Kedua, stasiun televisi nasional gagal menjadi media dengan tingkat dan perspektif yang nasional, karena dalam berita-berita dari Non-Jabodetabek, isu-isu yang sarat kepentingan publik justru lebih sedikit mendapat peliputan. Situasi ini bisa dilihat dalam dua kerangka tafsir.

Pertama, dalam kasus berita Non-Jabodetabek, ini bisa dimaknai sebagai efek sentralisasi. Umum diketahui, minimnya infrastruktur di daerah luar Jakarta (kantor biro, wartawan tetap, biaya operasional, dan sebagainya), melumpuhkan kemampuan televisi nasional untuk menjangkau informasi yang berharga dan kontekstual dari dan bagi publik di daerah luar Jakarta. Dan harus diakui, bahwa selain disumbangkan oleh metodologi *rating* Nielsen yang menjadikan penduduk Jakarta sebagai separuh lebih respondennya, ini juga merupakan persoalan kemampuan: bagaimana mungkin menjadi perusahaan media yang bisa menjangkau negeri seluas Indonesia, dengan beragam etnis, agama, bahasa, dan masalah? Bukan saja sekadar persoalan teknis menjangkaunya, tapi juga keadilan perspektifnya.

Namun, data yang menunjukkan bahwa berita asal Jabodetabek juga menjadikan kriminalitas (15,2%) dan kecelakaan (9%) secara durasi sebagai topik tertinggi, membuat kami harus memberi ruang pada tafsir kedua. Yaitu, mungkin saja soalnya adalah kegagalan jurnalisme televisi mendefinisikan berita. Berita dalam kerangka pikir stasiun TV nasional lebih dilihat sebagai komoditas ketimbang kewajiban etis untuk merawat demokrasi. Itulah mengapa kita disajikan begitu banyak topik yang secara publik memiliki kepentingan yang kecil.

Berita di televisi kita hari ini tak ubahnya *infotainment* yang doyan mengumbar hasrat *vouyerism* dan sensasional banal. Apa yang penting bagi berita televisi nasional dewasa ini adalah segala hal yang bisa menarik perhatian publik dan membuat mereka yang sedang beraktivitas untuk berhenti sejenak dan lalu menonton. Siapa yang tidak akan menghentikan aktivitasnya ketika mendengar berita mengenai kambing berkepala dua atau kecelakaan yang baru saja terjadi di lokasi dekat rumah?

Di atas segala logika *rating* itu pulalah kaidah jurnalistik sekalipun dikorbankan. Temuan kami mengenai "sumber"<sup>8</sup> dalam pemberitaan di televisi menguatkan dugaan tafsir kedua, yaitu bahwa persoalannya adalah dalam hal mutu jurnalismenya. Sebab, dari 2.638 item berita yang diteliti, 1.099 di antaranya tidak memiliki "sumber"<sup>9</sup>. Ini artinya, 41,7% berita tidak diproduksi berdasar kaidah-kaidah jurnalistik yang benar. Memang ada berita yang merupakan hasil laporan pandangan mata, seperti laporan bencana atau kemacetan di mana umumnya wartawan melaporkan peristiwa berdasar pengamatannya langsung. Namun, apakah mungkin setengah dari berita yang ada adalah semata hasil laporan pandangan mata?

8 Sumber yang dimengerti dalam penelitian ini adalah individu baik yang mewakili dirinya sendiri sebagai warga, wakil pemerintah, ahli, ataupun laporan resmi dari sebuah institusi, yang informasi berasal darinya digunakan sebagai rujukan berita. Sumber bisa tampil langsung di layar (*on camera*) ataupun dikutip pernyataannya saja.

9 Pengikutsertaan variabel "sumber" dalam penelitian ini pada awalnya hanya ditujukan dalam rangka melihat perbandingan suara (perspektif) pusat dan daerah dalam berita berdimensi lokal. Kami ingin melihat seberapa jauh berita berdimensi lokal memberi ruang pada suara atau komentator lokal; atau malah suara atau komentator Jabodetabek yang lebih mendapat ruang untuk mengomentari berita-berita berdimensi lokal. Namun, apa yang kami temukan justru adalah data yang tidak diproyeksikan sebelumnya. Yaitu data mengenai ada atau tidaknya "sumber" yang digunakan dalam jurnalisme televisi.

### BERITA TANPA SUMBER DI TELEVISI

STASIUN TV	TOTAL BERITA	BERITA TANPA SUMBER	%
	243	66	27.2%
	190	72	37.9%
	612	308	50.3%
	216	86	39.8%
	271	107	39.5%
	131	40	30.5%
	157	57	36.3%
	138	90	65.2%
	158	16	10.1%
	522	257	49.2%
<b>TOTAL :</b>	<b>2638</b>	<b>1099</b>	<b>41.7%</b>

4.3: Berita tanpa sumber di televisi

Sumber berita dalam kerja jurnalistik adalah tulang punggung validitas sebuah informasi. Sumber sebuah informasi haruslah bisa diverifikasi kebenarannya, dan ini yang membedakan kerja jurnalistik dengan desas-desus. Tiadanya sumber dalam sebuah berita membuat kebenaran sebuah informasi bukan saja tak bisa diverifikasi, tapi juga tak bisa dipertanggungjawabkan secara prinsip jurnalistik. Jika produk jurnalistik tidak lagi taat pada kaidahnya, maka kita mesti khawatir karena antara berita dan gosip tidak lagi bisa dipisahkan.

Pada tahap inilah kita tengah menyaksikan perpaduan sistem penyiaran yang tersentralisasi dan logika ekonomi media yang menghasilkan kegagapan media. dalam menjalankan fungsi publiknya. Sebagai catatan, pada persoalan mutu jurnalisme, tidak cukup dikatakan bahwa berakhirnya sentralisasi akan juga mengakhiri buruknya kualitas jurnalisme TV. Karena selama logika ekonomi politik mendikte bagaimana ruang redaksi bekerja, selama itu pula kita akan menyaksikan merosotnya kualitas percakapan publik kita di layar kaca.

## V. Refleksi: Jurnalisme Televisi, Jurnalisme Mercusuar

Persentase besarnya durasi dan frekuensi berita asal Jabodetabek di layar kaca, menunjukkan pada kita bahwa televisi kita gagal menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Televisi nasional idealnya menjadi ruang ruang publik nasional, dan untuk itu tugasnya mestilah memproduksi berita-berita yang berdimensi nasional; berita yang informasinya memiliki dampak luas bagi publik. Sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini, televisi nasional justru malah menjadi corong bagi perspektif lokal Jabodetabek dan menjadikan sebagian besar penduduk Indonesia lainnya hanya sebagai penonton persoalan-persoalan di Jabodetabek.

Kenyataan ini jelas kabar buruk bagi demokrasi. Ibarat mercusuar, pers adalah lampu yang ditembakkan agar menjadi bekal bagi publik untuk mengamati apa yang terjadi di sekitarnya dan lalu mengambil keputusan. Tapi dengan pola yang sentralistis, lampu tersebut hanya dapat melihat dalam radius tertentu. Padahal umum diketahui, demokrasi yang baik hanya mungkin berjalan dengan pasokan informasi yang berguna bagi publik, dan ini tentu mesti mendapat dukungan pers yang kritis dan berpihak pada publik. Tanpa itu, sentralisasi berpotensi menciutkan demokrasi. Atau, demokrasi hanya akan ada di panggung metropolitan Jakarta, sementara kebanyakan penduduk negeri ini hanya menjadi penonton.

Jarak tembak “jurnalisme mercusuar” yang hanya berkisar di Jabodetabek, membuat hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jabodetabek-lah yang mendapatkan penerangan. Sementara mereka yang berada di ruang gelap (luar Jabodetabek), dikurangi kemampuannya untuk mengetahui bagaimana berjalannya pemerintahan, dinamika politik, dan hal publik lainnya di daerah mereka. Apa yang mereka saksikan di layar kaca tidak lebih dari sebuah pertunjukan drama demokrasi ala Jakarta yang sama sekali jauh dari kenyataan keseharian.

Maka apa yang diusung jurnalisme televisi nasional bukanlah percakapan publik, melainkan etalase peristiwa acak tanpa relevansi bagi banyak orang. Fakta bahwa 73% berita berdimensi nasional berasal dari Jabodetabek mengonfirmasi tuduhan tadi. Jabodetabek bukan lagi sekadar sebagai pusat pemerintahan atau industri televisi, tapi secara hegemonik dijadikan representasi paling absah dari Indonesia.

“Aktor berita”, yang dalam penelitian ini dipakai untuk menentukan dimensi sebuah berita (nasional, lokal, atau internasional), menunjukkan satu hal lain: jarang sekali sebuah berita yang memakai narasumber atau tokoh lokal, sekalipun itu merupakan sebuah berita berdimensi lokal. Berita lokal, dengan persoalan-persoalan lokal, melulu menghadirkan aktor (narasumber) Jakarta. Alhasil ruang publik kita telah ditumpulkan oleh satu jenis suara atau perspektif yang memenuhi layar kaca, yaitu suara mereka yang berada di pusat. Padahal pendapat dari akademisi, warga, pejabat, politikus, atau aktivis tiap-tiap daerah bisa jadi lebih punya kedekatan dengan isu yang sedang diberitakan. Sayangnya, kesempatan untuk mengetengahkan suara

publik yang beragam keburu dibungkam oleh sentralisasi.

Benar, bahwa televisi nasional bukan satu-satunya media informasi publik. Masyarakat bisa juga mendapat informasi mengenai daerah tempat tinggalnya lewat berbagai medium lain seperti stasiun televisi atau surat kabar lokal. Namun, faktanya stasiun televisi lokal tidak cukup optimal melayani kebutuhan informasi tersebut karena kalah bersaing dengan stasiun televisi nasional yang didukung oleh sistem penyiaran yang tak adil. Surat kabar lokal pun sangat tertinggal penetrasinya dengan televisi yang sampai saat ini masih menjadi media dengan penetrasi paling jauh hingga pelosok Indonesia. Hingga 2010 menurut survei Inter Media, 91% penduduk Indonesia memiliki akses pada televisi (Merlyna Lim, 2011: 5). Lim menulis bahwa setidaknya kebanyakan penduduk dewasa di Indonesia menonton berita melalui televisi seminggu sekali. "Television also maintains its position as the most important source of news," tulis Lim. Dengannya jelas sudah, televisi adalah medium penting yang harus dijaga melalui mekanisme kontrol yang adil dan tepat. Akan tetapi, peran penting tersebut justru "dimandulkan" oleh sentralisasi.

Akhirnya, sentralisasi hanya menutup kemungkinan kita untuk memiliki ruang bersama, kecuali sebatas saling mengetahui tanpa perlu peduli. Televisi nasional telah menjadikan ruang publik kita tempat saling menyaksikan, bukan saling memahami.

Situasi ini tidak akan berubah, selama sentralisasi penyiaran masih menyandera kita. Penelitian ini menunjukkan pada kita, faktanya tidak pernah ada satu lampu mercusuar yang cukup terang untuk semua tempat. Apa yang kita butuhkan adalah tumbuhnya mercusuar-mercusuar lain di berbagai belahan bumi Indonesia. Hanya dengan begitu, potensi kita menumbuhkan ruang bersama agar bisa saling memahami, mungkin terjadi.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Ade. 2011. *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Yogyakarta: Bentang.
- Gans, Herbert. J. 2004. *Deciding What News*. Illinois: Northwestern University Press
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lim, Merlyna. 2011. *Democratization and Corporatization of Media in Indonesia*. Arizona: Participatory Media Lab and Ford Foundation.

## Sumber lain:

Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002.



the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.1 billion to 1.2 billion. The number of illiterate people in the world is expected to reach 1.5 billion by the year 2015.

Illiteracy is a major barrier to economic and social development. It is a major cause of poverty and social exclusion. Illiterate people are unable to read and write, which makes it difficult for them to find employment, access services, and participate in community activities. Illiteracy also makes it difficult for people to understand and use modern technologies, such as computers and mobile phones. Illiteracy is a major barrier to the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), which are a set of eight international development goals that were adopted by the United Nations in 2000.

There are many causes of illiteracy, including poverty, lack of access to education, and cultural barriers. In many developing countries, children are often forced to work to help support their families, which prevents them from attending school. In some cultures, there are strong beliefs that prevent girls from attending school. Illiteracy is also a result of poor quality of education. Many schools in developing countries do not have enough teachers or resources, and the quality of the education is often poor.

There are many ways to reduce illiteracy, including providing access to education, improving the quality of education, and addressing the social and economic barriers to education. One of the most effective ways to reduce illiteracy is to provide access to education for all children. This can be done by building schools, training teachers, and providing textbooks. Improving the quality of education is also important, as this will help to ensure that children are learning the skills they need to be literate.

Addressing the social and economic barriers to education is also important. This can be done by providing financial support to poor families, and by addressing the cultural barriers to education. For example, in some cultures, there are strong beliefs that prevent girls from attending school. These beliefs can be challenged by providing information and support to parents and community leaders.

Reducing illiteracy is a challenge, but it is a goal that is worth pursuing. Literacy is a key to economic and social development, and it is a right that every person should have. By providing access to education and addressing the barriers to education, we can help to reduce illiteracy and improve the lives of people around the world.

illiterate people are unable to read and write, which makes it difficult for them to find employment, access services, and participate in community activities. Illiteracy also makes it difficult for people to understand and use modern technologies, such as computers and mobile phones.

There are many causes of illiteracy, including poverty, lack of access to education, and cultural barriers. In many developing countries, children are often forced to work to help support their families, which prevents them from attending school. In some cultures, there are strong beliefs that prevent girls from attending school.

There are many ways to reduce illiteracy, including providing access to education, improving the quality of education, and addressing the social and economic barriers to education. One of the most effective ways to reduce illiteracy is to provide access to education for all children. This can be done by building schools, training teachers, and providing textbooks. Improving the quality of education is also important, as this will help to ensure that children are learning the skills they need to be literate.

Addressing the social and economic barriers to education is also important. This can be done by providing financial support to poor families, and by addressing the cultural barriers to education. For example, in some cultures, there are strong beliefs that prevent girls from attending school. These beliefs can be challenged by providing information and support to parents and community leaders.

Reducing illiteracy is a challenge, but it is a goal that is worth pursuing. Literacy is a key to economic and social development, and it is a right that every person should have. By providing access to education and addressing the barriers to education, we can help to reduce illiteracy and improve the lives of people around the world.

illiterate people are unable to read and write, which makes it difficult for them to find employment, access services, and participate in community activities. Illiteracy also makes it difficult for people to understand and use modern technologies, such as computers and mobile phones.